

SKRIPSI

TATA KELOLA SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN DI DINAS

PUPR KABUPATEN BULUKUMBA



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

**TATA KELOLA SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN DI DINAS
PUPR KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH FAHRUL

No Stambuk: 105641108019

ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan
Di Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : Muhammad Fahrul

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108019

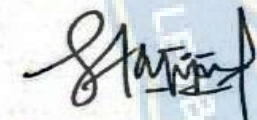
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

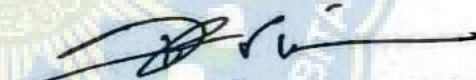
Menyetujui

Pembimbing I



Hamrun, S.IP., M.Si

Pembimbing II



Muhammad Randhy A, S.IP., M.Si

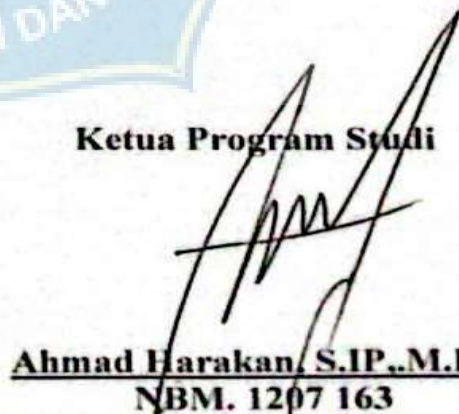
Mengetahui :

Dekan



Dr. Hj. Ikhwan Malik, S.Sos., M.Si
NBM.730.727

Ketua Program Studi



Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

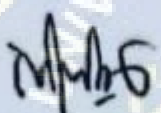
PENERIMAAN TIM

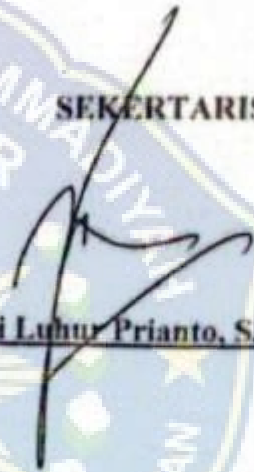
Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:0214/FSP/A.4-II/XII/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata I (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu 13 Januari tahun 2024.

TIM PENILAI

KETUA

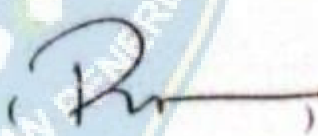
SEKERTARIS


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

TIM PENGUJI

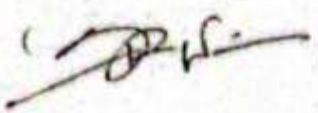
1. Dr. A. Rosdianti Razak, M.Si (Ketua)



2. Syukri, S.Sos., M.Si



3. Muhammad Randhy A.S.IP., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Fahrul

Nomor Stambuk : 105641108019

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri dan dengan bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 10 Februari 2023

Yang Menyatakan



Muh Fahrul

ABSTRAK

Muh Fahrul, Hamrun, Muhummad Randy Akbar, Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan Di Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengutamakan data dalam bentuk kalimat/ Pernyataan yang bersumber dari data primer/informan. Informasi tersebut di pilih sesuai dengan informan terkait dengan obyek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan Tata Kelola Air berdasarkan permasalahan yang dibahas. Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena tipe penelitian ini berusaha menggambarkan data yang telah diolah dan mengkaji secara analisis dan sistematis berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Adapun hasil penelitian yaitu Perencanaan meliputi Perencanaan tata kelola air di Kabupaten Bulukumba atau *human resource planning* merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan dari posisi yang diinginkan pada masa depan, anggaran, metode, mesin, pemasaran, peralatan. dilakukan dengan tujuan pelayanan yang lebih baik dan tertata. Dan juga bahwa tata kelola air di Kabupaten Bulukumba itu sudah memiliki perencanaan yang matang dan bagus, organisasi yang membantu masyarakat yaitu Kegiatan program PAMSIMAS terkhusus di Kabupaten Bulukumba telah mencapai 52 Desa/Kelurahan di sepuluh kecamatan, pengarahannya ini dimaksudkan agar karyawan yang ada terhindar dari kemangkiran yang tak berarti. Suatu kemangkiran akan sedikit berarti apabila karyawan yang tidak masuk kerja tersebut selama ketidakhadirannya ikut mengerjakan pekerjaan kantor di luar atau membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasinya, upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah dan Dinas PUPR dalam menangani permasalahan tersebut yaitu pihak Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba masih belum bisa mengetahui penyebab terjadinya kerusakan, tetapi Dinas PUPR Bulukumba selalu memantau setiap hari dengan cara inspeksi jaringan untuk mengetahui ada atau tidak kebocoran yang terjadi. daerah beberapa tahun sebelumnya.

Kata kunci: Tata Kelola, Sumber Daya Air, *Sustainability*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang tak terhingga dan nikmat-nya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan di Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dorongan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada, Kedua orang tua saya tercinta Ayah Firman dan Ibunda Rahmatia sebagai motivator yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan memberikan semangat serta dukungan moril tanpa henti kepada penulis untuk selalu optimis dalam menjalani aktivitas perkuliahan.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ahmad Harakan S.IP, M.HI selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Hamrun, S.IP.,M.Si selaku pembimbing I dan Muhammad Randy Akbar, S.IP.,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Para dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan
6. Terima kasih kepada bapak kepala Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba yang telah meberikan izin untuk melakukan penelitian
7. Terima kasih kepada DINAS PUPR Kabupaten Bulukumba atas waktu dan informasinya
8. Dan terima kasih kepada masyarakat yang mau meluangkan waktunya memberikan informasi kepada penulis
9. Terkhusus kelas IPC terima kasih atas waktunya selama masah perkuliahan kurang lebih 4 tahun
10. Dan teruntuk teman-teman, sodara sodari terima kasih atas waktu dan kenangannya, Muh Syaiful Nur, Impal, Hermanto, Ismawati, Dewi Sinta, Elma Tahira Husnun, Dian Adyati, dan yang tidak sempat saya sebutkan terima kasih banyak atas waktunya

Akhir kata penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

Makassar, 22 Juni 2023

Yang menyatakan



Muh Fahrul



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori	10
C. Kerangka Pikir	22
D. Fokus Penelitian.....	23
E. Deskripsi Fokus Penelitian	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	25
B. Jenis dan Tipe Penelitian	26
C. Sumber Data.....	26
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Keabsaha Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	32
B. Hasil Penelitian.....	43
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP	63

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Informan Penelitian	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	18
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya air adalah bagian integrasi kehidupan makhluk hidup yang memberikan kehidupan di planet biru ini dalam bentuk formasi flora dan fauna dengan dukungan kehidupan yang sangat seimbang. Air adalah salah satu sumber daya alam yang vital, baik untuk kehidupan di muka bumi maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai kehidupan. Sebagai sumber daya alam maka kegiatan pengelolaan sumber daya air menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya untuk air minum dan sanitasi, maupun untuk memenuhi kebutuhan penghidupannya sebagai petani untuk mengairi tanamannya serta mengelola sumber daya air agar dapat tercukupi sepanjang tahun. Dari definisi tersebut para pakar lingkungan mengadakan pengembangan lebih lanjut mengenai sumber daya lingkungan dan sumber daya air. Pengembangan adalah pembinaan dan pengaturan air dan/atau sumber air yang meliputi aspek-aspek pembangunan, perlindungan dan pemanfaatan (Rakhmad Armus, 2021).

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air disusun secara

terkoordinasi di antara instansi yang terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Penyusunan pola pengelolaan perlu melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat tidak hanya diberi peran dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, tetapi berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air (R Indonesia 2019,).

Pengelolaan sumberdaya air sangat berhubungan erat dengan keberlanjutan pembangunan. Sehingga sangat jelas bahwa kemampuan pengelolaan sumberdaya air juga dipengaruhi oleh sumberdaya manusia untuk memberi nilai tambah sumberdaya pendukung pembangunan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan kunci apakah pembangunan yang dilaksanakan itu berkelanjutan, berkesinambungan atau tidak (Sri et al., 2019).

Air bersih dan dapat diakses sangat penting untuk kesehatan manusia, lingkungan yang sehat, pengentasan kemiskinan, ekonomi yang berkelanjutan, serta perdamaian dan keamanan. Namun lebih dari 40% populasi global tidak memiliki akses ke air bersih yang memadai. Pada tahun

2025, 1,8 miliar orang akan tinggal di negara atau wilayah yang benar-benar kekurangan air, menurut UN-Water. Kekurangan air menjadi ancaman besar bagi beberapa sektor, termasuk ketahanan pangan. Pertanian menggunakan sekitar 70% air tawar dunia yang dapat diakses. Negara-negara berkembang paling terpengaruh oleh kekurangan air, banjir dan kualitas air yang buruk. Hingga 80% penyakit di negara berkembang terkait dengan air dan sanitasi yang tidak memadai. Di banyak negara, polusi atau naiknya permukaan air laut mencemari sumber air terpercaya. Stres air dan kurangnya sanitasi secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan anak perempuan. Faktor-faktor ini dapat mengubah kesehatan, keselamatan, dan peluang mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Perempuan dan anak perempuan seringkali menjadi pengelola utama sumber daya alam, terutama untuk keperluan rumah tangga dan pertanian skala kecil. Mereka adalah agen perubahan utama dalam praktik pengelolaan air berkelanjutan (Dukungan et al., 2022).

Oleh karena itu, kendala yang di alami oleh penduduk di hampir semua belahan dunia yaitu air bersih dan sanitasi yang baik serta layak. Pendapat ini dikuatkan dengan informasi dari Cronin et al. (2017) yang mengungkapkan bahwa faktanya, kebanyakan penduduk di dunia tidak memiliki akses ke air bersih, yang menjadikan tujuan ini sebagai target Sustainable Development Goals (SDG's) ke 6. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua penduduk memiliki akses dalam pemanfaatan air bersih, layak pakai, fasilitas sanitasi yang baik serta layak secara rasional. Air sebagai sumber energi yang dibutuhkan untuk aktivitas manusia diantaranya sebagai pasokan air untuk

industri, irigasi pertanian, kebutuhan individu (mandi, cuci, dan kakus). Aktivitas manusia yang berkaitan dengan penggunaan air seharusnya dapat dilakukan dengan diimbangi pengelolaan sumberdaya air yang berkualitas dengan baik. Dapat digambarkan, ketika kita menggunakan air bersih (berasal dari air permukaan), tentunya akan muncul air limbah (bekas yang digunakan). Dan tantangan selanjutnya yaitu bagaimana cara pengelolaan air yang telah digunakan tersebut. Selain masalah kualitas air, masalah lain muncul yaitu berkaitan dengan jumlah ketersediaan SDA yang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang semakin tinggi dan meningkat (Fakhriyah et al., 2021).

Kewenangan daerah dalam tata pengurusan serta pengelolaan sumberdaya air yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah pada tataran lokal, wewenang tersebut meliputi menetapkan pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas provinsi. Sedangkan dalam menjaga hubungan dengan negara lain, tetap dikelola mengenai keberadaan wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional. Pemerintah berwenang dalam menjaga kawasan lindung, adapun wewenang pemerintah meliputi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumberdaya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional, mengatur dan menetapkan serta memberi izin. Pengelolaan sumberdaya air di daerah yang berkelanjutan berada dalam tanggungjawab pemerintah berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara memiliki hak menguasai sumberdaya air, di dalam penguasaannya itu dipergunakan untuk kemakmuran rakyat (Sri et al., 2019).

Perusahaan Daerah Air Minum atau singkatnya dikenal dengan DINAS PUPR berdiri karena adanya tuntutan jasa air bersih oleh masyarakat umum, Sebagai salah satu perusahaan yang ada di daerah, DINAS PUPR sangatlah diperlukan bagi seluruh golongan masyarakat, pun tak terkecuali di Kabupaten Bulukumba. Namun, pada akhir tahun 2019 DINAS PUPR khususnya di Kabupaten Bulukumba melakukan perubahan model dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Hal tersebut diketahui telah ditetapkan menyusul setelah disahkannya Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Kabupaten Bulukumba oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam pelaksanaan rapat paripurna. Salah satu permasalahan yang telah terjadi pada tahun 2018 berkaitan dengan kelangkaan air bersih yang menimpa Kabupaten Bulukumba adalah permasalahan yang begitu krusial, dimana berdasarkan hasil observasi awal diakui bahwa telah terjadi kelangkaan air bersih selama dua bulan lamanya yang menyebabkan masyarakat di sana sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih, bahkan yang lebih memprihatinkan ada yang sampai rela membeli air bersih yang dijual eceran untuk memenuhi kebutuhan air dalam satu hari. Sebagaimana diketahui, hal tersebut disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan (Ahmira, 2020).

Kedudukan terkait sumber daya air sendiri telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dapat

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebelumnya, Pasal 33 ayat (1) juga melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang ataupun perseorangan karena menurut Undang-Undang tujuan penguasaan air adalah agar tindakan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, mengetahui pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan peraturan perundangundangan terkait sumber daya air seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kedua, menganalisis peran dan kontribusi pemerintah daerah kabupaten klaten dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya air di daerahnya berdasarkan fakta dilapangan dan peraturan daerah yang mengatur hal-hal tersebut (Rasidi & Boediningsih, 2023).

Dalam perkembangannya, air secara sangat cepat menjadi sumberdaya yang makin langka dan tidak ada sumber penggantinya. Meskipun Indonesia termasuk 10 negara kaya air, namun dalam pemanfaatannya terdapat permasalahan mendasar yang masih terjadi. Pertama, adanya variasi musim dan ketimpangan spasial ketersediaan air. Pada musim hujan, beberapa bagian di Indonesia mengalami kelimpahan air yang luar biasa besar sehingga berakibat terjadinya banjir dan kerusakan lain yang ditimbulkannya. Di sisi

lain, pada musim kering kekurangan air dan kekeringan menjadi bencana di beberapa wilayah lainnya. Permasalahan mendasar yang kedua adalah terbatasnya jumlah air yang dapat dieksplorasi dan dikonsumsi, sedangkan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah menyebabkan kebutuhan air baku meningkat secara terarah. Masalah kualitas air semakin mempersempit sumber-sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketersediaan air sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, bahkan air dapat menjadi salah satu penghambat pertumbuhan perekonomian (Air et al., 2004).

Sejatinya, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah dobrakan dari masyarakat (*civil society*) atas pembangunan konvensional yang dinilai tidak memperhatikan aspek lingkungan. Untuk mengubah paradigma pembangunan konvensional setidaknya dibutuhkan beberapa langkah fundamental yang akan merombak total paradigma pembangunan konvensional. Pertama, pembangunan berkelanjutan merubah perspektif jangka pendek menjadi perspektif jangka panjang. Kedua, pembangunan berkelanjutan memperlemah posisi dominan aspek ekonomi dan menempatkannya pada tingkat yang sama dengan pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan. Ketiga, kini skala preferensi individu menjadi indikator yang menentukan barang apa yang akan diproduksi dan lewat metode alokasi sumber daya se-efisien mungkin. Keempat, pasar telah gagal menangkap sinyal sosial dan lingkungan melalui mekanisme harga. Kelima, pemerintah harus bisa mengoreksi kegagalan pasar melalui kebijakan yang tepat (Sunaryo & Publishing, 1945).

Oleh karenanya, pembangunan berkelanjutan sangat penting diterapkan untuk menjaga sumber daya air, terutama air tanah karena merupakan kebutuhan utama bagi setiap makhluk hidup. Sebagai unsur kehidupan yang sangat berharga, pada tahun 2002, *The United Nation Committee on Economic, Cultural and Social Rights* menyampaikan *General Comment 15* yang menyatakan bahwa air tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, dan akses terhadap air (*right to water*) adalah hak asasi manusia: "*The human right to water entitles everyone to sufficient, affordable, physically accessible, safe and acceptable water for personal and domestic uses*" (Sunaryo & Publishing, 1945).

Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba adalah perusahaan daerah yang bertugas dalam pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba. Penyaluran air bersih yang dilakukan menggunakan mobil tangki yang dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba, yaitu pembelian kupon yang di sediakan pihak Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba. Pada pemesanan air bersih menggunakan mobil tangki dengan membeli kupon yang disediakan pihak Dinas PUPR , minat masyarakat Kabupaten Bulukumba menjadi tinggi, sedangkan jumlah armada mobil tangki terbatas, hanya berjumlah 9 unit dengan rincian kapasitas 4 Kubik berjumlah 5 unit dan kapasitas 5 kubik berjumlah 4 unit. Berdasarkan data laporan yang ditinjau pada periode Januari sampai dengan April, bahwa pemesanan mobil tangki air yang masuk berjumlah 1.922 pemesan, jika dirata-ratakan jumlah pemesan dalam satu hari berjumlah 16 pelanggan Namun dalam proses

pemesanan maupun proses pendistribusiannya masih belum maksimal karena belum adanya yang dapat memaksimalkan proses pengelolaan pendistribusian air.

Banyaknya masyarakat yang melakukan pemesanan air dengan menggunakan kupon dan setiap pemesanan tersebut memiliki kriteria yang berbeda-beda akan tetapi dalam pengelolaannya masih menggunakan buku besar. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pendistribusian air menggunakan mobil tangki karena akan menyita waktu pada pengelolaan data pada bagian administrasi. Oleh karena itu Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba sangat membutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan yang membantu untuk penindak lanjutan pendistribusian air sehingga dengan adanya keputusan tersebut dapat meningkatkan pelayanan pendistribusian air pada Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba. Untuk mendukung tersebut digunakan Metode *Technique for Order Performance by Similarity to idea Solution* (TOPSIS) yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan multikriteria yang praktis. Keputusan yang diambil melalui Metode ini adalah keputusan terbaik yang berdasarkan jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negative (Santiary et al., 2018). Tingkat kesulitan akan muncul ketika banyak yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Mengacu referensi diatas, maka penulis mengangkat judul Implementasi Metode TOPSIS pada Sistem Pendukung Keputusan Pendistribusian Air Bersih Menggunakan Mobil Tangki Pada Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, maka uraian latar belakang yang telah dikemukakan, adapun penelitian ini berjudul “ **Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan Di Kabupaten Bulukumba**”.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengkaji latar belakang yang telah diuraikan diatas, ditentukan masalah pokok dalam penelitian ini yakni bagaimanakah Tata kelola pemerintah dalam sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui Tata kelola pemerintah dalam sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Dapat dijadikan referensi untuk pembahsan yang berkaitan dengan Tata kelola pemerintah dalam sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba
 - b. Memberikan masukan terhadap penanganan Tata kelola pemerintah dalam sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba
2. Secara praktis
 - a. Dapat dijadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
 - b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat Tata kelola pemerintah dalam sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian melakukan penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang tata kelola sumber daya air:

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Walihuddin (Walihuddin, 2019).	Tata Kelola Sumber Daya Air dan Sumur Resapan	Pemerintah Kota Pekanbaru menyadari bahwa kebutuhan akan air bersih kian meningkat di tengah terbatasnya sumber air bersih di tengah kota. Alternatif pemanfaatan air dengan menggali sumber air tanah dalam menjadi satu-satunya cara yang murah dan mudah dilakukan oleh masyarakat, tentu saja kondisi itu mesti diatur agar supaya kelestarian air sumber tanah Pekanbaru sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang diundangkan pada tanggal 22 Agustus 2006.

2	Mamok Suprpto (Suprpto, 2012)	Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan	Pengelolaan Sumberdaya Air pada daerah irigasi, didasarkan pada debit andalan dengan faktor-K sebagai tolok ukur keberhasilannya. Adanya perubahan iklim, banyak daerah irigasi sering mengalami kekeringan dan gagal panen. Keraguan terhadap efektivitas penggunaan faktor-K dalam pengelolaan sumberdaya air, memberikan inspirasi perlunya kajian terhadap pemakaian ambang batas pengelolaan. Penelitian ini menggunakan indeks keandalan (Ia) dan indeks kelentingan (Ik) dalam pengelolaan daerah irigasi Notog, daerah aliran sungai Pemali. Terdapatnya sifat alami aliran mengisyaratkan bahwa tiap daerah irigasi memiliki ambang batas berbeda. Konsep telah diuji-cobakan pada daerah irigasi Notog, dengan ditetapkan awal nilai $Ia \geq 0,75$ dan $Ik \geq 0,5$. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai $Ia \geq 0,75$ dapat dicapai, tetapi nilai $Ik \geq 0,5$ sulit. Keadaan ini selaras dengan fenomena kekeringan yang sering dialami oleh daerah irigasi Notog. Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor-K semata, tidak dapat menjamin hasil panen yang baik.
---	----------------------------------	--	--

3	HENDRIS (Carin et al., 2018)	Keberlanjutan tata kelola sumber daya air goa plawan studi pada organisasi kelola air mandiri di desa giricahyo kecamatan purwosari Kabupaten Gunung kidul	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya air yang dilakukan oleh OKAM gagal berkelanjutan. Adapun faktor yang melatarbelakangi antara lain: pertama, pembangunan yang dilakukan pemerintah bersifat keproyekan, yaitu bangun, sahkan dan tinggalkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Emil Salim pemerintah masih mengedepankan aspek ekonomi dan mengesampingkan aspek sosial dan lingkungan. Kedua, model pengelolaan OKAM tidak profesional. Perihal ini merupakan dampak dari pendampingan yang tidak maksimal terhadap pengurus OKAM. Fenomena demikian senada dengan argumentasi Elinor Ostrom bahwa faktor monitoring merupakan penentu dalam sebuah tata kelola sumber daya air. Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh hadirnya teknologi tinggi. Masyarakat merasa asing dengan teknologi yang dihadirkan pemerintah. Selain hal itu, minimnya partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dalam struktur kepengurusan OKAM yang
---	------------------------------------	--	--

			menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus adalah perangkat desa.
--	--	--	--

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang di paparkan, dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini pada :

1. Perbedaan penelitian ini dengan judul Tata Kelola Sumber Daya Air dan Sumur Resapan adalah penelitian ini membahas tentang Tata kelola pemerintah dalam sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba. Sementara penelitian sebelumnya berfokus kepada Tata Kelola Sumber Daya Air dan Sumur Resapan .
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan adalah penelitian ini membahas mengenai pengelolaan sumber daya air sedangkan penelitian ini membahas tentang Tata kelola pemerintah dalam sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Bulumba.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Keberlanjutan tata kelola sumber daya air goa plawan studi pada organisasi kelola air mandiri di desa giricahyo kecamatan purwosari Kabupaten Gunung kidul adalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana Tata kelola pemerintah dalam sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba .

B. Kerangka Teori

1. *Good governance*

Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia, namun pemahaman tentang konsep *good governance* berbeda-beda, dan membayangkan bahwa dengan konsep *good governance* akan memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, sehingga praktik korupsi menjadi berkurang dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan dan kebutuhan warganya. Perbaikan kinerja pelayanan public dinilai penting oleh semua *stakeholders*, yaitu pemerintah, warga pengguna, dan para pelaku pasar. Pelayanan *public* adalah ranah dari ketiga unsur *governance* melakukan interaksi yang sangat intensif, jika pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan era, maka manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan para pelaku pasar.

Adanya kepercayaan (*trust*) antara pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah merupakan prasyarat yang sangat penting untuk menggalang dukungan yang luas bagi pengembangan praktik *good governance* di Indonesia. *Good governance* sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah *civil society*. *Good governance* bisa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat) (Widanti, 2022).

Negara yang berperan dalam pemberi layanan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan secara adil dapat berjalan dengan baik apabila pemerintahnya memegang teguh pada 3 dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu bidang lingkungan, ekonomi dan sumber daya manusia. Konsep *good governance* ini memiliki keterkaitan dengan 3 aktor utama, yaitu: Pemerintah sebagai penyelenggara, korporat sebagai penggerak bidang perekonomian, serta masyarakat sipil sebagai pihak penyesuai. Pihak pihak tersebut saling mempengaruhi dan masing masingnya memiliki peran dalam penyelenggaraan yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak-pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk dapat terjadi (Efendi, 2005). Konsep *good governance* ini dapat diwujudkan melalui upaya adanya kesinergian antara masyarakat sipil, privat dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi, lingkungan dan. *Good governance* sekurang-kurangnya harus dapat mencapai prasyarat adanya partisipasi, efesiensi dan efektivitas, transparansi, dan keadilan (Handayani & Nur, 2019).

Governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks GCG, *governance* disebut tata kelola perusahaan. *Turnbull Report* (Muh Arief Effendi, 2009:1) mendefinisikan tata kelola (*governance*) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Lembaga *Corporate Governance* di Malaysia, yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (GCCG) mendefinisikan

corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan (Muh Arief Effendi, 2009: 2). Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, dan sebagainya telah diartikan oleh berbagai pihak dalam manajemen. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna (Siswanto, 2018).

2. Tata kelola SDGs

Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000, (A/Ris/55/2 *United Nations Millennium Development Goals*). Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan (Wahyuningsih, 2018).

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs (Akhir, D.

J., 2015). Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deflation sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal. SDGs dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ,pada tahun 2020-2024 menunjukkan informasi tentang akses pelayanan air minum belum maksimal pada tahap pembangunan di periode yang telah lampau. Peningkatan akses terhadap air bersih yang aman dan memadai sangat perlu dioptimalkan. Akses ke air bersih memiliki beberapa tantangan; dari pengelolaan kelembagaan yang lemah hingga keterlibatan dan sumbangsih pemerintah daerah yang terbatas. *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030 merencanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bahwa, akses terhadap air minum bersifat universal bagi semua orang dan air minum yang harus memenuhi spesifikasi dan kualitas standar baku mutu kesehatan sebagai air minum yang aman dan dari sumber mata air yang bersih. Sejauh ini, baru 6,8% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air bersih (Purwanto, 2020). Target TPB yakni akses air bersih pada tahun 2030 bagi seluruh masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Dalam RPJMN tahun 2020-2024, dan dibagian akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) tahun 2005-2025, terdapat permasalahan dalam pemenuhan percepatan akses air bersih secara nasional. (Fakhriyah et al., 2021).

3. Sumber daya air

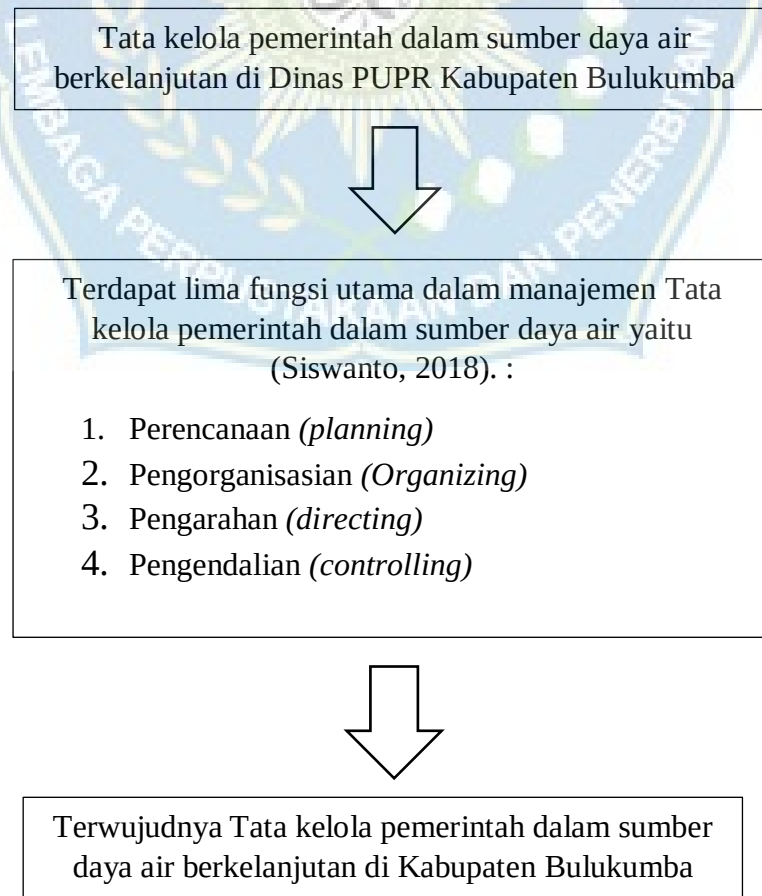
Sumber daya air memiliki multi-dimensi, di antaranya dimensi bio-fisik, politik dan ekonomi. Aspek biofisik berupa benda hidup (bio atau *living*) dan benda mati (fisik atau non *living*). Elemen bio meliputi manusia, tumbuhan, dan berbagai macam hewan. Sedangkan aspek fisik adalah air itu sendiri dalam hal ketersediaan (*availability*) dan kualitas, tanah (jenis tanah, kemiringan), tutupan lahan (*vegetation cover*), tataguna lahan seperti area pertanian, permukiman, dan lain-lain (Suni & Legono, 2021).

Melalui setiap kebijakan, pembangunan mengenai pengelolaan sumberdaya air sangat berhubungan dengan tiap aspek kehidupan. Konsep dasar kebijakan dari pengelolaan dimulai dari bagaimana menyediakan air bersih hingga pada pembangunan area irigasi yang berasaskan adil dan merata bahkan sampai pada perlindungan terhadap fungsi-fungsi ekosistem. Pada tataran umum, sebagaimana proteksi yang diberikan untuk pengelolaan sumber daya alam ini, maka kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, rumah tangga, rekreasi dan aktivitas lingkungan hidup. Aspek inilah yang kiranya memerlukan pengaturan, sehingga pemanfaatan air tetap berangkat dan berdasar pada dimensi yang berkeadilan dan membawa manfaat maksimal bagi manusia (Wulandari & Ilyas, 2019).

C. Kerangka Fikir

Governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks GCG, *governance* disebut tata kelola perusahaan. Lembaga *Corporate Governance* di Malaysia, yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (GCCG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, dan sebagainya telah diartikan oleh berbagai pihak dalam manajemen. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna (Siswanto, 2018).

Tabel 2.1
Kerangka pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian ini yaitu Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen Tata kelola pemerintah dalam sumber daya air yaitu (Siswanto, 2018) : Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*directing*), Pemotivasian (*motivating*), Pengendalian (*controlling*).

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Perencanaan (*planning*) yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/ periode tertentu serta tahapan/ langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan Di kabupaten Bulukumba
2. Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan Di kabupaten Bulukumba.
3. Pengarahan (*directing*) yaitu suatu rangkaian kegiatan yang memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan Di kabupaten Bulukumba.

4. Pengendalian (*controlling*) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan Di kabupaten Bulukumba dapat berjalan dengan baik dan terkontrol dengan baik.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bulukumba dalam Tata kelola pemerintah dalam sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba dan dilakukan selama 2 bulan lamanya. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena menjadi sumber informasi dan pengambilan data yang dapat mendukung penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Tata kelola pemerintah dalam sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan permasalahan dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti yaitu peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial untuk keberlanjutan masyarakat yang terdiri dari peran alokasi sumber daya, peran regulator, dan peran kesejahteraan sosial. Dengan berusaha melihat fenomena yang terjadi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dijangkau dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dengan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok-pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Informan penelitian ini dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* dimana metode tersebut adalah mengambil sampel yang dapat mewakili perspektif lebih luas dari kriteria, yang sudah ditetapkan sebelumnya dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian terkait Tata kelola pemerintah dalam sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	INISIAL
1	Andi Zulkifli Indrajaya, Ap	Kepala Dinas PUPR	ZL
2	Andi Nurjaya	Pengelola DINAS PUPR Kabupaten Bulukumba	AN
3	Nursia	Masyarakat	NR
4	Marsuki	Masyarakat	RK
5	Salmia	Masyarakat	SL

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Implementasi Program.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen :

1). Reduksi data (data reduction), 2). Penyajian data (data display), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions).

1. Reduksi Data

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompokkelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data

Komponen kedua yakni penyajian data (data display) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan teras bertumpuk, maka penyajian data (data display) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan, peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu

dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbedabeda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

<i>Jumlah Penduduk</i>	<i>Nama Wilayah</i>	<i>Jumlah Kebutuhan Air (ltr/org/hari)</i>
75.980 jiwa	Gantarang	90-100
56.521 jiwa	Ujung Bulu	90-100
42.154 jiwa	Ujung Loe	90-100
25.757 jiwa	Bontobahari	60-100
21.390 jiwa	Bontotiro	60-100
24.663 jiwa	Herlang	60-100
49.194 jiwa	Kajang	90-100
52.731 jiwa	Bulukumpa	90-100
40.594 jiwa	Rilau Ale	90-100
31.619 jiwa	Kindang	90-100

420.603 jiwa

Bulukumba

90-100

Sumber: Dinas PUPR

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa. Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.

Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%.

Penduduk Bulukumba secara umum menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar disamping bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat adalah Bahasa Bugis dan Bahasa Konjo yang berdialek Makassar, yang keduanya merupakan bahasa pengantar dalam lingkungan keluarga dan terutama di daerah pedesaan. Kabupaten ini mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan, maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah. Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulu-bulu dan stasiun Herlang. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang dan pada bagian selatan curah hujannya rendah.

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat. Sungai di kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar

dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba adalah salah satu unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba.

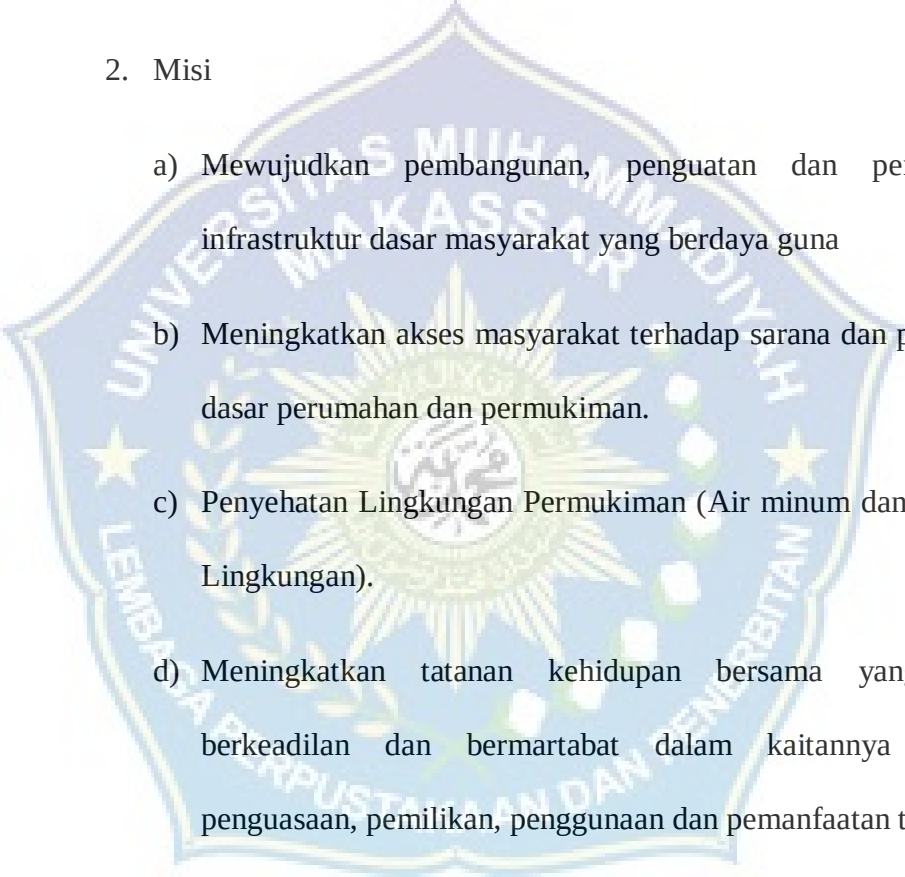
Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perumahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas 34 Perumahan, Permukiman dan Pertanahan memiliki kewenangan untuk pengangan di bidang perumahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

a. Visi Dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Perumahan, Permukiman yang layak huni dan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mewujudkan tanah dan pertanahan untuk kemakmuran rakyat

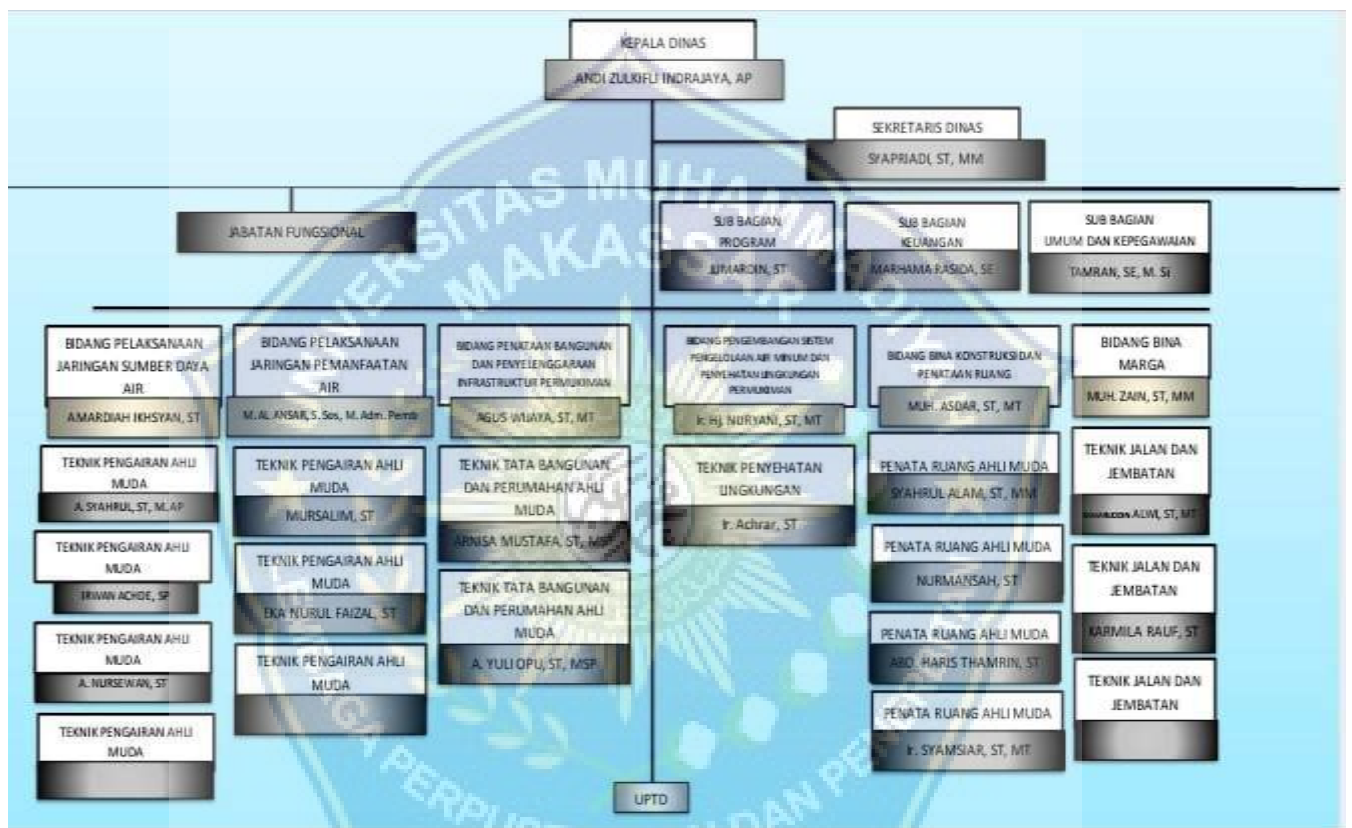
2. Misi

- 
- a) Mewujudkan pembangunan, penguatan dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat yang berdaya guna
 - b) Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman.
 - c) Penyehatan Lingkungan Permukiman (Air minum dan Sanitasi Lingkungan).
 - d) Meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

b. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan

Struktur organisasi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang susunan organisasi. Tujuan struktur organisasi yaitu untuk mempermudah pegawai mengetahui posisi jabatan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA



c. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan

- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Kepala Dinas

- a) Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan rencana strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- 2) Merumuskan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
- 3) Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
- 4) Mengendalikan pengelolaan keuangan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;

- 5) Menyelenggarakan urusan umum Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;

1. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Sekretariat

a) Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta program di Lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Sekretaris adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas perumahan, permukiman dan pertanahan;
- 2) Melaksanakan pelayanan kesekretariatan dinas perumahan, permukiman dan pertanahan;
- 3) Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas perumahan, permukiman dan pertanahan;
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a) Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan tugas dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan.
- 4) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan

3. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Sub Bagian Keuangan

- a) Sub Bagian Keuangan dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan
 - 2) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 - 3) Memeriksa bahan dan data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran.
 - 4) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran.
 - 5) Mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggaran.
 - 6) Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan pelaporan keuangan.
 - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
4. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Sub Bagian Program dan Pelaporan

a) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program dan pelaporan.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

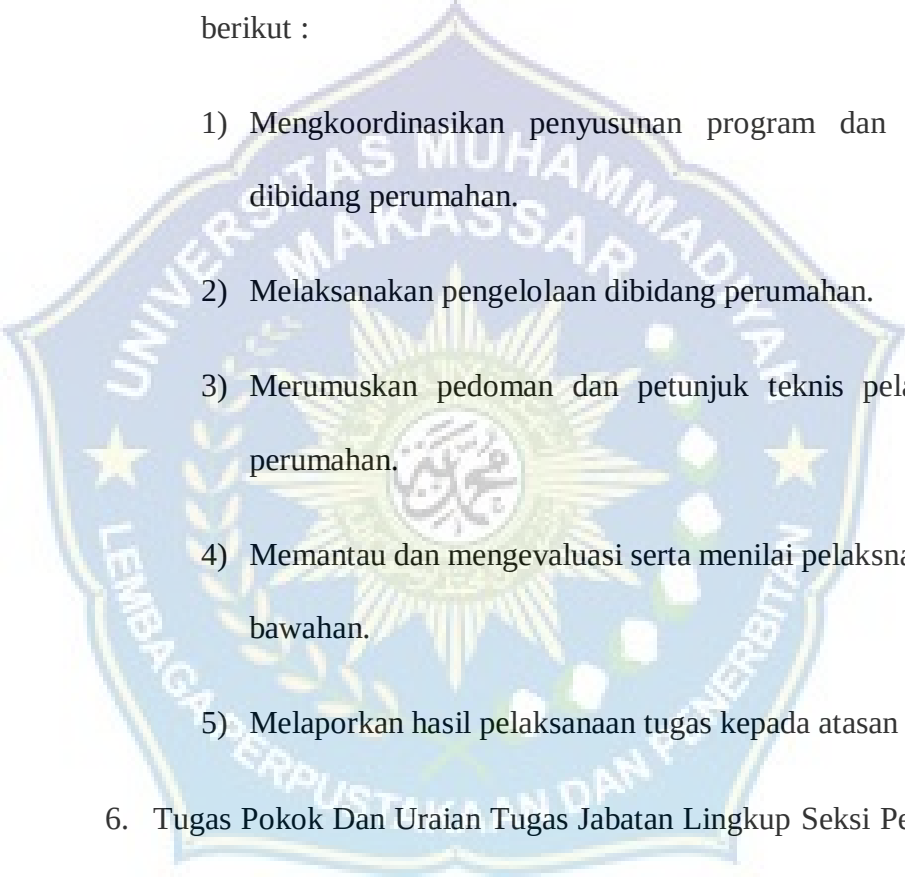
- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bagian Program dan Pelaporan sebagai laporan dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan tugas dan member petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.
- 3) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan.
- 4) Memonitoring dan megevaluasi laporan kegiatan.
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

5. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Perumahan

a) Bidang perumahan dipimpin seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Bidang Perumahan adalah sebagai berikut :

- 
- 1) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dibidang perumahan.
 - 2) Melaksanakan pengelolaan dibidang perumahan.
 - 3) Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perumahan.
 - 4) Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan.
 - 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
6. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Seksi Pendataan, Perencanaan Dan Evaluasi Perumahan

a) Seksi pendataan, perencanaan dan evaluasi perumahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait pendataan, perencanaan dan evaluasi perumahan.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Perumahan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kegiatan seksi pendataan, perencanaan dan evaluasi perumahan;
- 2) Menyusun data dan informasi Perumahan;
- 3) Menyusun kebijakan dan strategi daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi perumahan;
- 4) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- 5) Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penyediaan rumah, perumahan, dan lingkungan hunian;
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;

7. .Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Seksi Penyediaan Perumahan

a) Seksi Penyediaan Perumahan bidang perumahan dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, evaluasi dan koordinasi penyelenggaraan pengawasan Penyediaan Perumahan.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Perumahan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kegiatan Seksi Penyediaan Perumahan.
- 2) Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.
- 3) Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan.
- 4) Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional.
- 5) Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.

8. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian Perumahan

a) Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian Perumahan bidang perumahan dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian perumahan.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Pemanfaatan dan pengendalian Perumahan adalah sebagai berikut :

1) Menyusun program kegiatan seksi pemanfaatan dan pengendalian perumahan.

2) Melakukan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

3) Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional.

4) Melaksanakan pengelolaan utilitas umum perumahan.

5) Melakukan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).

6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.

9. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

a) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman adalah sebagai berikut :

1) Menyusun program kegiatan seksi Air minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman.

2) Melaksanakan pengelolaan system air limbah domestic di perdesaan dan perkotaan.

3) Melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana air minum dan air limbah.

4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;

B. Hasil Penelitian

Air bersih sangat penting karena menjadi salah satu sumber kehidupan manusia. Untuk itu, tata kelola dan pengolahan air yang berkelanjutan, terlebih di perkotaan, menjadi hal mutlak dilakukan guna meminimalkan risiko krisis air yang dapat memicu bencana global. Menciptakan tata kelola kota dan pengelolaan air secara berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pihak swasta dan masyarakat harus ikut ambil bagian. Seperti halnya yang dilakukan UOB Indonesia yang senantiasa berperan aktif untuk terus berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui UOB's Sustainable Finance Frameworks.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba Dinas PUPR juga dituntut untuk bisa melakukan pengembangan dan pengolahan air bersih serta mencakup area luas. Efisiensi penggunaan air bersih, pemanfaatan air permukaan, serta strategi dan upaya lainnya harus terus digiatkan agar masyarakat dapat menikmati air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Cara mengatasi pencemaran air tanah dan air permukaan juga harus diperhatikan. Hal ini disampaikan oleh informan Kepala Dinas mengenai kehadiran air bersih mengatakan bahwa:

“Kehadiran air bersih sebagai sumber kehidupan juga diharapkan dapat dirasakan semua kalangan masyarakat karena sekaligus merupakan upaya menuju keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat, terlebih di kota atau daerah-daerah padat penduduk yang ada di Kabupaten Bulukumba” (Hasil wawancara pada tanggal 1 September 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa air merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat menikmati air bersih. Pemberian subsidi air bersih oleh pemerintah kota, selain dapat membantu

menekan biaya rumah tangga juga bisa menjaga keamanan kota karena warganya didorong untuk beralih dari air tanah ke air pipa. Selain itu, pendistribusian air bersih secara merata juga harus ditingkatkan. Tak kalah penting, pengendalian banjir harus terus diupayakan guna menghindari terjadinya bencana di musim hujan. Pembersihan waduk dan saluran air, revitalisasi sungai, pembersihan sampah, serta edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan tanpa henti.

Tata kelola yang baik merupakan salah satu cara menghadirkan air bersih bagi masyarakat perkotaan. Terdapat lima indikator utama dalam manajemen Tata kelola pemerintah dalam sumber daya air yaitu, Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*directing*), Pemoti), Pengendalian (*controlling*).

1. Perencanaan (*planning*)

Siswanto (2018) mendefinisikan perencanaan sebagai berikut: “perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai”. Perencanaan merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan

menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan serta dianggap perlu untuk mencapai hasil terbaik.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain. Agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis sumber daya air, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Dinas PUPR dalam mengatur berjalannya pemasukan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bulukumba.

Program Penambahan Jaringan Sambung Rumah di Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba, Semakin berkembangnya wilayah Kabupaten Bulukumba maka perlu untuk mempertimbangkan kondisi hidraulika pada komponen-komponen sistem distribusi air minum akibat adanya perubahan kondisi jaringan. Dalam kegiatan distribusi air bersih, sumber mata air yang dimanfaatkan memiliki kapasitas sumber ± 300 lt/dt. Melalui pengelolaan Dinas PUPR Daerah Kabupaten Bulukumba, mengingat jangkauan pelayanan untuk Kabupaten Bulukumba baru mencapai ± 54 % dari target

nasional sebesar 80 % untuk penduduk perkotaan, sehingga sebagai instansi yang berwenang terhadap masalah air minum Kota.

Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba meningkatkan pelayanannya dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang telah ada (eksisting) dan merencanakan pengembangan jaringan baru agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara bekesinambungan. Hal ini disampaikan oleh informan bagian pengelolaan Dinas PUPR. Yaitu mengatakan bahwa air bersih harus selalu aman dan ada sehingga lebih mempermudah masyarakat hal ini menyampaikan bahwa:

“perencanaan akan hal tata kelola air ini sudah di buat suatu rencana seperti memberikan Pipa ke rumah-rumah masyarakat yang tidak memiliki sumber mata air seperti Sumur atau Sumur Bor hal ini lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan air bersih” (Hasil wawancara oleh informan AN pada tanggal 17 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Program jaringan sambung rumah di Dinas PUPR adalah sambungan pipa distribusi Dinas PUPR menuju meteran pipa rumah tangga. Dari sumber air, bisa water treatment maupun sumber daya air yang telah diolah, dialirkan melalui pipa transmisi menuju tempat penampungan air maupun langsung mulai dipisahkan dengan pipa distribusi. Pipa transmisi ukurannya bervariasi. Kondisi rumah yang mendapatkan Sambungan Rumah (SR) sesuai kriteria dan bersedia menjadi pelanggan Dinas PUPR. jaringan sambungan Rumah di Dinas PUPR di kabupaten Bulukumba.

Untuk menguatkan pernyataan dari Kepala Dinas PUPR dan bagian pengelolaan Dinas PUPR maka penulis juga melakukan wawancara kepada

Masyarakat terkait penyediaan pipa oleh Dinas PUPR yang mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat sangat bangga dan bahagia atas adanya penyediaan pipa oleh Dinas PUPR sehingga lebih mempermudah untuk mendapatkan air bersih’ (hasil wawancara oleh informan RK pada tanggal 19 September 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (Dinas PUPR) adalah perusahaan Daerah yang selama ini melayani air bersih khususnya untuk pelayanan dalam kota dan sekitarnya serta pada tempat wisata Bira, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih pedesaan maka pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan pembangunan sumur bor dan membendung beberapa sumber mata air yang dialirkan secara gravitasi ke rumahrumah penduduk, disamping itu terdapat pula partisipasi masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih.

Sumber air bersih yang dikelola Dinas PUPR untuk kebutuhan dalam kota dan sekitarnya disuplai dari sungai Bialo dan Bontonyeleng Kecamatan Gantarang dan untuk kebutuhan pariwisata Bira disuplai dari mata air lotong-lotong Kecamatan Bontobahari. Hal ini di sampaikan oleh Pegawai PU yaitu Bidang Pengembangan selaku informan yang mengatakan bahwa air sangat penting bagi kehidupan manusia:

“dalam melakukan perencanaan untuk keberlangsungan air kami dari pemerintah sudah menghimbau kepada Dinas PUPR untuk melakukan perencanaan yang matang agar masyarakat dapat merasakan air yang bersih dan lancar sesuai dengan kebutuhan sehari-hari” (Hasil wawancara oleh informan NR pada tanggal 18 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa air sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat oleh sebab itu penggunaan air di abad 21 yang meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan pertumbuhan penduduk, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pemanfaatan air yang bijak agar air bersih dan sanitasi yang layak dapat mudah diakses sebagai kunci utama yang menentukan kualitas kesehatan masyarakat.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelola Air di Kabupaten Bulukumba dalam penyediaan air bersih dilakukan setiap akhir tahun. Perencanaan meliputi perencanaan SDM, anggaran, metode, mesin, pemasaran, peralatan, dilakukan dengan tujuan pelayanan yang lebih baik dan tertata. Dan juga bahwa tata kelola air di Kabupaten Bulukumba itu sudah memiliki perencanaan yang matang dan bagus. Kompleksnya pengelolaan sumber daya air memerlukan berbagai pendekatan dan kebijakan yang melibatkan multisektor dan instansi, alokasi dana nasional, dan pengambilan keputusan kolektif. Termasuk memerlukan kebijakan yang secara global diterima dan masuk akal, mengandung pertimbangan sosial dan lingkungan, serta merangkul para pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan kunci kebijakan nasional sumber daya air yang berkontribusi pada kebijakan internasional.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut Siswanto (2018) pengorganisasian dapat diartikan sebagai alat untuk merealisasikan tujuan bersama diantara orang yang berinteraksi dan bekerja sama tersebut. Pengorganisasian (*organizing*) merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dapat di capai dengan efisien.

Organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian kerja yang akan dilakukan, pembatasan tugas dan kewajiban, otoritas dan tanggung jawab, serta penetapan hubungan diantara elemen organisasi. Dengan demikian, orang yang bergabung dalam organisasi tersebut dapat bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama secara efisien dan efektif. Sedangkan organisasi dalam arti statis adalah suatu bagan atau struktur yang berwujud dan bergerak demi tercapainya tujuan bersama, dalam istilah lain sering disebut sebagai struktur atau tata raga organisasi. penyediaan air bersih tertuang dalam struktur organisasi. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari Kabag Transmini, Kabag Produksi, Kabag Peralatan, dan Seksi Teknis.

Mereka menyatakan pendapat yang sama bahwa terdapat struktur organisasi penyediaan air bersih. Bagian-bagian yang terdapat pada struktur organisasi penyediaan air bersih Hal ini disampaikan oleh informan Pengelola Dinas PUPR kabupaten Bulukumba Bahwa tata kelola air bersih memiliki Organisasi yang bergerak di bidang tersebut hal ini dijelaskan bahwa:

“Kami dari Dinas PUPR memiliki program untuk Air Bersih yang di berikan oleh masyarakat yaitu PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat” (Hal ini di sampaikan Oleh Informan AN pada tanggal 17 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas bahwa organisasi pelaksana dibentuk disetiap tingkatan (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan) untuk mendukung pelaksanaan program Pamsimas. Pelaku program di setiap tingkatan memiliki tanggung jawab sesuai peran dan fungsinya. Adapun uraian pelaku program Pamsimas antara lain : Tingkat Desa dan Masyarakat yakni Pemerintah Desa/Kelurahan, Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Tingkat Kecamatan yaitu Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Teknis Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota yaitu Kepala Daerah Tingkat II (Bupati/Kota), Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, Tim Teknis Kabupaten/Kota, Unit Pengelola Program Kabupaten/Kota (DPMU), Satuan Kerja (Satker) Kabupaten/Kota, *District Management and Advisory Consultant* (DMAC – WSS, HH, CD).

Untuk menguatkan pernyataan dari Kepala Dinas PUPR dan bagian pengelolaan Dinas PUPR maka penulis juga melakukan wawancara kepada Masyarakat bahwasanya pemerintah sudah memberikan program yang baik dijelaskan bahwa :

“kami dari masyarakat sangat bangga dan bersyukur dengan adanya program ini dapat membantu kami mendapatkan air bersih dan juga kami sudah tidak meragukakan adanya persediaan air karena sudah di siapkan oleh Pemerintah yaitu Program PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dan saya rasa program ini sudah baik dan sangat membantu” (hal ini di sampaikan oleh NR pada tanggal 19 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) secara umum adalah meningkatkan akses pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan dan daerah pinggiran kota (*peri urban*) serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun model penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat.

Hambatan yang terjadi dalam pengorganisasian penyediaan air bersih di Dinas PUPR Bulukumba yaitu komunikasi yang kurang lancar antar pegawai hal tersebut terjadi karena kesibukan para pegawai. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara Pengelola Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba, bahwa

“Hambatan dalam organisasi ya itu komunikasi yang kurang lancar intinya, hambatan sesama pegawai, biasanya karena kesibukan masing-masing jadi koordinasinya itu kurang” (hasil wawancara oleh informan AN pada tanggal 17 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi atau pertemuan rutin merupakan upaya yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (Dinas PUPR) Bulukumba dalam mengatasi hambatan pengorganisasian. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap akhir bulan, yang dihadiri oleh semua pegawai di Dinas PUPR Bulukumba.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola air di Kabupaten Bulukumba pemerintah sudah memberikan organisasi yang membantu masyarakat yaitu Kegiatan program PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) terkhusus di Kabupaten Bulukumba telah mencapai 52 Desa/Kelurahan di sepuluh kecamatan. Tujuan Program Pamsimas adalah terciptanya masyarakat hidup bersih dan sehat melalui peningkatan akses masyarakat miskin pedesaan dan pinggiran kota terhadap pelayanan air minum dan sanitasi.

3. Pengarahan (*directing*)

Siswanto (2018) mengatakan bahwa pengarahan adalah proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Perencanaan sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam perencanaan terkandung suatu aktivitas tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan.

Suatu perencanaan tata kelola Air Kabupaten Bulukumba ditetapkan untuk dijadikan pedoman normatif dalam pencapaian tujuan. Dengan kata

lain dapat diartikan sebagai perencanaan yang telah ditetapkan meskipun memiliki sifat fleksibel namun prinsip yang terkandung di dalamnya harus tetap dijamin kontinuitasnya. Sering kali para manajer hierarki tengah atau hierarki pertama maupun pemimpin organisasi lainnya kurang yakin akan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga tidak jarang mengubah rencananya ditengah perjalanan.

Hal ini di sampaikan oleh informan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba, pengarahannya perlu di lakukan agar tata kelola air dapat di jalankan serta mencegah timbulnya pengaruh struktur masyarakat maupun perubahan lingkungan dan iming-iming dari pihak luar. hal ini dijelaskan bahwa:

“setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksi aman bagi kesehatan , sehingga pihak Dinas PUPR wajib mendistribusikan air bersih sesuai kualitas yang ditetapkan serta aman untuk kesehatan pelanggan” (Hasil wawancara oleh informan ZL Pada tanggal 17 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa Penyediaan air yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (Dinas PUPR) baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan memadai untuk keperluan rumah tangga maupun industri, sehingga menunjang perkembangan ekonomi dan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam rangka pembinaan bidang sumber daya air pada umumnya dan pengendalian daya rusak air pada khususnya, maka perlu dilakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas dan profesional dalam bidangnya. Hal ini juga di sampaikan oleh informan Masyarakat yang mengatakan bahwa;

“Dinas PUPR pada umumnya juga sering memperlihatkan tenaga-tenaga kurang profesional dalam penyediaan air bersih, kurangnya penguasaan teknologi, serta lemahnya manajemen pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (Dinas PUPR), baik dalam sumber dana, sumber daya manusia” (Hasil wawancara oleh informan SL pada tanggal 20 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Secara umum manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non profit. Pemerintah yang dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya, telah mencoba mengambil langkah dengan mendirikan usaha yang melayani penyediaan air bersih, untuk menjamin penyebaran penyediaan air bersih, untuk menjamin penyebaran yang menjangkau semua masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (Dinas PUPR) di tiaptiap Kabupaten khususnya di Kabupaten Bulukumba atau Kota dengan status sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masuk dalam kategori penyelenggara pelayanan yang bersifat profit dengan tugas memberikan pelayanan air bersih kepada warga masyarakat pada suatu daerah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan fungsi pengarahan ini dimaksudkan agar karyawan yang ada terhindar dari kemangkiran yang tak berarti. Suatu kemangkiran akan sedikit berarti apabila karyawan yang tidak masuk kerja tersebut selama ketidakteradaannya ikut mengerjakan pekerjaan kantor di luar atau membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasinya. Dengan adanya pengarahan diharapkan bahwa prosedur kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun menjadi suatu kebiasaan. Apabila sudah terbiasa dilaksanakan diharapkan dapat membudaya di lingkungan sistem itu sendiri.

4. Pengendalian (*controlling*)

Pengendalian menurut Siswanto (2018) diartikan sebagai proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti. Pengendalian daya rusak air dimaksudkan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik, terpelihara dan berkelanjutan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem yang harmonis dan seimbang.

Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. Pencegahan

sebagaimana dimaksud adalah dengan lebih mengutamakan kegiatan non fisik. Yang dimaksud dengan kegiatan fisik adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.

Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. Contoh dari daya rusak air seperti banjir, erosi, kekeringan, kepunahan satwa dan tumbuhan, wabah penyakit, longsor, tsunami, terjadinya amblesan tanah. Hal ini di jelaskan oleh pengelola Dinas PUPR yaitu air merupakan kunci utama untuk berlangsungnya hidup manusia, dapat di lihat bahwa:

“Keadaan yang membahayakan merupakan keadaan air yang luar biasa, yang melampaui batas rencana sehingga jika tidak diambil tindakan darurat diperkirakan akan dapat menjadi bencana yang lebih besar terhadap keselamatan umum” (hasil wawancara oleh informan AN pada tanggal 17 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemulihan akibat daya rusak air dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem sarana dan prasarana sumber daya air. Pemulihan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengelola Sumber Daya Air, dan masyarakat.

Pengawasan preventif dilakukan dengan memberikan petunjuk kepada para pegawai agar selalu menggunakan alat pelindung diri saat melakukan pekerjaan di lapangan, sedangkan untuk mengetahui kondisi alat atau pipa yang rusak ataupun kropos dan melihat kebocoran di wilayah Kabupaten Bulukumba dengan melakukan pemantauan setiap hari melalui

inspeksi jaringan. Hal ini disampaikan oleh informan masyarakat tentang pengawasan tata kelola air untuk masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Kita mendapatkan petunjuk dari karyawan teknis untuk selalu menggunakan alat pelindung diri. Untuk alatnya atau pipa air yang kropos atau pecah kita ada pengecekan rutin yaitu dengan melakukan pemantauan, melakukan pemantauan itu kita menggunakan inspeksi jaringan” (Hasil wawancara oleh informan RK pada tanggal 18 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terkait kerusakan pada jaringan perpipaan yang dapat menyebabkan kebocoran yaitu dengan cara melakukan perbaikan pada jaringan perpipaan yang mengalami kerusakan.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah dan Dinas PUPR dalam menangani permasalahan tersebut yaitu pihak Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba masih belum bisa mengetahui penyebab terjadinya kerusakan, tetapi Dinas PUPR Bulukumba selalu memantau setiap hari dengan cara inspeksi jaringan untuk mengetahui ada atau tidak kebocoran yang terjadi. Bukan hanya memantau dengan inspeksi jaringan saja melainkan dari pihak SPI sebagai pengawas melakukan pengawasan terhadap bidang teknik serta bidang keuangan setiap 3 bulan sekali.

C. Pembahasan

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan tata kelola air di Kabupaten Bulukumba atau human resource planning merupakan proses manajemen dalam menentukan

pergerakan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan dari posisi yang diinginkan pada masa depan, sedangkan sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Tujuan dari integrasi system adalah untuk menciptakan proses prediksi demand sumber daya manusia yang muncul dari perencanaan strategis dan operasional secara kuantitatif, dibandingkan dengan prediksi.

Ketersediaan yang berasal dari program-program tata kelola air. Perencanaan sumber daya air harus disesuaikan dengan strategi tertentu agar tujuan utama dalam memflitasi efektivitas organisasi dapat tercapai. Strategi bisnis pada masa yang akan datang yang dipengaruhi perubahan kondisi lingkungan menuntut manajer untuk mengembangkan program-program yang mampu menterjemahkan current issues dan mendukung rencana bisnis masa depan. Keselarasan antara bisnis dan perencanaan sumber daya manusia dapat membangun perencanaan bisnis yang pada akhirnya menentukan kebutuhan SDM dan Air.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasiaan belum dilakukan dengan baik dikarenakan masih minimnya tenaga khusus di bidang penyediaan air bersih. Pernyataan tersebut ditandai dengan mayoritas pegawai Dinas PUPR v lulusan SLTA dan SMP, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba dalam pembagian tugas sesuai dengan kemampuan atau keahlian pegawai. Pembagian kerja

Kabupaten Bulukumba sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab para pegawai sudah dilaksanakan dengan baik. Pembagian kerja di Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba disesuaikan dengan bidang dan keahlian masing-masing pegawai. Pegawai yang di tempatkan di bagian tertentu akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Terdapat permasalahan pada pengorganisasian staf di Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba, yakni kurangnya komunikasi antar pegawai yang mengakibatkan tidak efektifnya koordinasi masing-masing pegawai. Upaya yang dilakukan yakni dengan mengadakan pertemuan rutin karyawan setiap satu bulan sekali

3. Pengarahan (*directing*)

Pengarahan digunakan untuk segala komponen yang berkaitan dengan manajemen Dinas PUPR Bulukumba dalam menyediakan air bersih, agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan porsi masing-masing, sehingga tujuan perusahaan agar tercapai. Pengarahan tersebut bisa berupa komunikasi yang baik yaitu dengan cara melakukan pertemuan rutin untuk para pegawai. Sedangkan untuk motivasi dilakukan guna untuk memberikan dorongan kepada semua pegawai agar mereka melaksanakan tugasnya masing-masing.

Kemudian untuk sosialisasi yang dilakukan Dinas PUPR Bulukumba dilakukan setiap akhir bulan, yang dihadiri oleh seluruh pegawai Dinas PUPR Bulukumba. Permasalahan yang terjadi dalam proses pengarahan di Dinas PUPR Bulukumba, yakni adanya pegawai yang tidak

serius dalam mengikuti sosialisasi. Karyawan tidak mendengarkan pengarahan yang diberikan direksi, sehingga informasi yang diberikan tidak diterima dengan baik. Dinas PUPR Bulukumba dalam mengatasi hambatan dalam pengarahan tersebut yakni dengan mentertibkan pegawai agar lebih menghargai dan mendengarkan pengarahan dari direks. Direksi juga memberikan motivasi untuk semua pegawai agar mereka lebih termotivasi untuk melaksanakan pekerjaan.

4. Pengendalian (*controlling*)

Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. Pencegahan sebagaimana dimaksud adalah dengan lebih mengutamakan kegiatan non fisik. Yang dimaksud dengan kegiatan fisik adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. Contoh dari daya rusak air seperti banjir, erosi, kekeringan, kepunahan satwa dan tumbuhan, wabah penyakit, longsor, tsunami, terjadinya amblesan tanah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil dari penelitian di atas dapat di tarik kesimpulan:

1. Perencanaan (*Planning*) meliputi perencanaan SDM, anggaran, metode, mesin, pemasaran, peralatan.dilakukan dengan tujuan pelayanan yang lebih baik dan tertata. Dan juga bahwa tata kelola air di Kabupaten Bulukumba itu sudah memiliki perencanaan yang matang dan bagus
2. Pengorganisasian (*Organizing*) yang membantu masyarakat yaitu Kegiatan program PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) terkhusus di Kabupaten Bulukumba telah mencapai 52 Desa/Kelurahan di sepuluh kecamatan.
3. Pengarahan (*Directing*) ini dimaksudkan agar karyawan yang ada terhindar dari kemangkiran yang tak berarti. Suatu kemangkiran akan sedikit berarti apabila karyawan yang tidak masuk kerja tersebut selama ketidakberadaannya ikut mengerjakan pekerjaan kantor di luar atau membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasinya.
4. Pengendalian (*Controlling*) Upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah dan Dinas PUPR dalam menangani permasalahan tersebut yaitu pihak Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba masih belum bisa mengetahui penyebab terjadinya kerusakan, tetapi Dinas PUPR Bulukumba

selalu memantau setiap hari dengan cara inspeksi jaringan untuk mengetahui ada atau tidak kebocoran yang terjadi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat kami berikan yaitu

1. Kepada pemerintah semoga bisa lebih meningkatkan kinerja yang baik agar masyarakat mudah untuk mendapatkan air.
2. Terkhusus untuk Dinas PUPR lebih meningkatkan ketelitian agar masyarakat mendapatkan air dengan adil
3. Dan untuk masyarakat agar selalu memakai air dengan baik dan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmira, N. (2020). Kualitas Pelayanan Penyediaan Air Bersih Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. *Universitas Negeri Makassar*, 1–13.
- Air, P., Bangsa, P. B., Indonesia, D., Dasar, U., Republik, N., Tahun, I., No, U.-U., Air, S. D., & Indonesia, M. (2004). *Potensi Sumber Daya Air di Indonesia* 1. 7, 1–20.
- Asrul, B. E. W., & Zuhriyah, S. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Pendistribusian Air Bersih Menggunakan Mobil Tangki pada DINAS PUPR Kota Makassar dengan Menggunakan Metode TOPSIS. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(1), 35. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2020762630>
- Carin, A. A., Sund, R. ., & Lahkar, B. K. (2018). KEBERLANJUTAN TATA KELOLA SUMBER DAYA AIR GOA PLAWAN STUDI PADA ORGANISASI KELOLA AIR MANDIRI DI DESA GIRICAHYO KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *Journal of Controlled Release*, 11(2), 430–439.
- Dukungan, H., Terhadap, K., Pasien, M., & Stroke, P. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4, 1707–1715.
- Fakhriyah, Yeyendra, & Marianti, A. (2021). Integrasi Smart Water Management Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Konservasi Sumber Daya Air di Indonesia. *Indonesian Journal of Conservation*, 10(1), 67–41. <https://doi.org/10.15294/ijc.v10i1.31036>
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- R Indonesia 2019. (2004). *PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR*.
- Rakhmad Armus, D. (2021). *Pengembangan sumber daya air*. 20.
- Rasidi, A., & Boediningsih, W. (2023). *Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah*. 2(2), 415–424.
- Siswanto, U. S. (2018). *Prinsip Pengelolaan BUMDes berdasarkan teori Good Corporate Governance Transparansi*. 15–36.
- Sri, A., Wulandari, R., Ilyas, A., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2019). *Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia : Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*. 6(November), 287–299.
- Sunaryo, T. M., & Publishing, B. (1945). *DISRUPSI KEADILAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TANAH DI INDONESIA* Sholahuddin.

- Suni, Y. P. K., & Legono, D. (2021). Manajemen Sumber Daya Air Terpadu Dalam Skala Global, Nasional dan Regional. *Jurnal Teknik Sipil*, 10(1), 77–88.
- Suprpto, M. (2012). Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan. *Jurnal Teknik Sipil*, 12(1), 61–65. <https://doi.org/10.24002/jts.v12i1.621>
- Walihuddin, M. (2019). *Tata Kelola Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015*. 10, 57–64.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>
- Wulandari, A. S. R., & Ilyas, A. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Gema Keadilan*, 6(3), 287–299. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6750>





PEDOMAN WAWANCARA

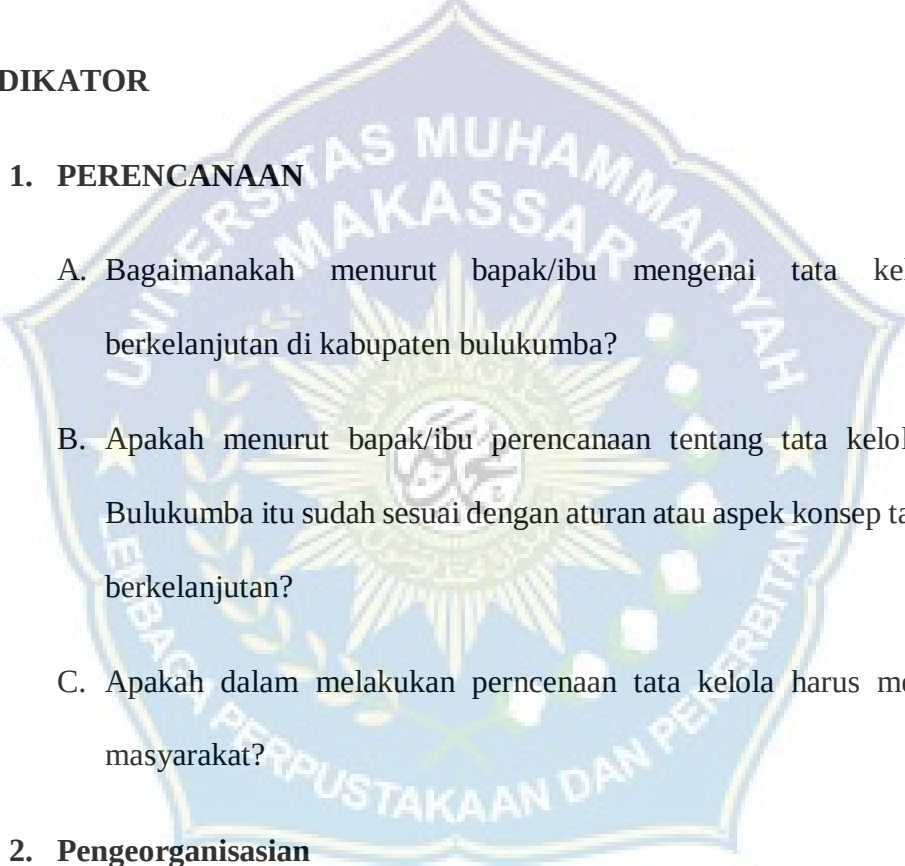
NAMA : MUH FAHRUL

NIM :105641108019

**JUDUL : TATA KELOLA SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN
DI DINAS PUPR KABUPATEN BULUKUMBA**

INDIKATOR

1. PERENCANAAN

- 
- A. Bagaimanakah menurut bapak/ibu mengenai tata kelola air berkelanjutan di kabupaten bulukumba?
 - B. Apakah menurut bapak/ibu perencanaan tentang tata kelola air di Bulukumba itu sudah sesuai dengan aturan atau aspek konsep tata kelola berkelanjutan?
 - C. Apakah dalam melakukan perencanaan tata kelola harus melibatkan masyarakat?

2. Pengeorganisasian

- A. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai air yang bersih bagi masyarakat Bulukumba?
- B. Apakah dalam memberikan air kepada masyarakat kendala apa saja yang di hadapi oleh pemerintah?
- C. Bagaimanakah peran organisasi dalam mengatasi tata kelola air?

3. Pengarahan

- A. Hal-hal apa saja yang dilakukan dalam pemanfaatan air berkelanjutan di kabupaten Bulukumba?
- B. Bagaimanakah cara pemerintah agar air bersih tetap aman dan tidak ada hambatan?
- C. Bagaimanakah cara agar semua masyarakat dapat memiliki air bersih yang di sediakan oleh DINAS PUPR ?

4. Pengendalian

- A. Bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah agar air bersih tetap terjamin dan bisa di nikmati warga Bulkumuba?
- B. Apakah dampak positif dari adanya tata kelola air berkelanjutan?
- C. Apakah hubungan antara pembangunan dengan pelastarian ,lingkungan hidup.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 065588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1520/05/C.4-VIII/V/1444/2023

27 Syawal 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

17 May 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0699/FSP/A.1-VIII/V/1444 H/2023 M tanggal 16 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH FAHRUL

No. Stambuk : 10564 1108019

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TATA KELOLA SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN DI DINAS PUPR KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 Mei 2023 s/d 23 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. U. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **17312/S.01/PTSP/2023**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Bulukumba

di
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1520/05/C.4-VIII/V/1444/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUHAMMAD FAHRUL**
Nomor Pokok : **105641108019**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TATA KELOLA SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN DI DINAS PUPR KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Mei s/d 23 Juli 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717_199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal*.



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

**SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 408/DPMPTSPTK/IP/VII/2023**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor 074/785/Bakesbangpol/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap	: Muhammad Fahrul
Nomor Pokok	: 105641108019
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang	: S1
Institusi	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Tempat/Tanggal Lahir	: Bulukumba / 2001-11-10
Alamat	: BTN Graha Fuad Arfah
Jenis Penelitian	: Kualitatif
Judul Penelitian	: Tata kelola sumber daya air berkelanjutan di dinas PUPR Kabupaten Bulukumba
Lokasi Penelitian	: Di Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba
Pendamping	: Muhammad Randy akbar s.ip.,m.si
Instansi Penelitian	: Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba
Lama Penelitian	: tanggal 23 Mei 2023 s/d 23 Juli 2023

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 17 Juli 2023



Kepala Dinas DPMPSTPTK
Dra. Hj. Umrah Aswani, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda-IV/c
Nip. : 19670304 199303 2 010



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Fahrul

Nim : 105641108019

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	3 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Desember 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursyah S. Ham, M.I.P
 NBM. 964 591

Muhammad Fahrul 105641108019 Bab I

ORIGINALITY

4%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

1

Submitted to Universitas Negeri Padang

Student Paper

2%

2

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Muhammad Fahrul 105641108019 Bab II

ORIGINALITY REPORT

19

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

7%

2

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

6%

3

jdod.ejournal.unri.ac.id

Internet Source

3%

4

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

2%

5

www.kompasiana.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Muhammad Fahrul 105641108019 Bab III

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sulselprov.go.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Bellevue Public School

Student Paper

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Muhammad Fahrul 105641108019 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sulselprov.go.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Bellevue Public School

Student Paper

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Muhammad Fahrul 105641108019 Bab V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



eprints.ums.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes

Exclude bibliography

On
Off

Exclude matches



DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Dengan Perwakilan Kepala Dinas PUPR Kab. Bulukumba



2. Dokumentasi Dengan Pengelola PDAM Kab. Bulukumba



3. Dokumentasi Dengan Warga



4. Dokumentasi Dengan Warga



5. Dokumentasi Dengan Warga



**6. Dokumentasi Salah Satu Bangunan Program PAMSIMAS
(Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)
Dinas PUPR Kab. Bulukumba**



**7. Dokumentasi Pipa Penyediaan Air Bersih oleh Dinas PUPR
Kab. Bulukumba**



RIWAYAT HIDUP



Muhammad Fahrul,. Lahir pada tanggal 10 November 2001 , di Desa Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Penulis Merupakan anak Pertama dari 2 Bersaudara, dari pasangan Bapak Firman dan Ibu Rahmatia. Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Aisyiah Muhammadiyah pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Inpres 293 Tanah Kong-Kong dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs DDI Mattoanging Bantaeng dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat , penulis melanjutkan ke MAN 2 Bulukumba dan tamat pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosil Dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2023 Penulis mendapatkan gelar S1 pada program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Judul Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan Di Dinas Pupr Kabupaten Bulukumba Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.

